

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Annisa Zahra ¹ , Fauzi Arif Lubis ², Hendra Harmain ³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Pada instansi pemerintah masih sering ditemukan kecurangan dalam transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu penelitian ini didorong untuk mengetahui kualitas pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pada suatu instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada instansi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada Kepala BBSU dan seluruh pegawai BBSU sebanyak 32. Data kuesioner dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25 dengan melakukan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pegawai sedangkan akuntabilitas belum berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan secara simultan, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 35,1%.

Kata Kunci: *transparansi, akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah*

Abstract

In government agencies, fraud is still often found in transparency and accountability. Therefore, this study was encouraged to determine the quality of the influence of transparency and accountability on performance in a government agency. This research was conducted at the North Sumatra Province Language Center (BBPSU) agency. This type of research is quantitative research with data collection methods used in this study are questionnaire and documentation techniques. Data obtained through questionnaires given to the Head of BBSU and all BBSU employees as many as 32. The questionnaire data was analyzed using IBM SPSS Statistics Version 25 by conducting simple linear regression analysis. Based on the results of the study, transparency has an effect on the performance of employee agencies while accountability has no effect on the performance of government agencies. While simultaneously, transparency and accountability affect the performance of government agencies by 35.1%.

Keywords: *transparency, accountability, government agency performance*

Copyright (c) 2023 Annisa Zahra

□ Corresponding author

Email Address : annisazahra056@gmail.com

1.PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan pilar utama dalam mengelola keuangan negara. Hal ini terbukti dengan lahirnya paradigma pada prinsip *Good Government Governance*. Prinsip -

prinsip yang terikat yaitu *transparency, responsiveness, consensus orientation, effectiveness, efficiency equity, dan accountability*. Untuk menjalankan prinsip tersebut pemerintah melakukan beberapa langkah yaitu: (1) menerima masukan pendapat masyarakat dan menciptakan kerjasama yang baik dalam hal pemberdayaan masyarakat; (2) membenahi mekanisme pengendalian yang keliru serta panduan dari peraturan - peraturan internal; dan (3) menciptakan budaya kompetisi dalam pelayanan kepada masyarakat (S et al., 2020)

Penerapan sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah telah diatur dalam Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan alat pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang akan dinilai secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (Accounting et al., 2021). Transparansi dan akuntabilitas adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah dan masyarakat mengharapkan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah mewajibkan setiap instansi pusat maupun daerah sampai eselon II untuk menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berkaitan dengan pentingnya keterbukaan informasi tentang kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah, diterbitkan juga Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah (Laoli & Si, 2019).

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005, 2009). Maka sangat diperlukan pada proses transparansi maupun akuntabilitas. Transparansi merupakan penyampaian informasi yang terbuka, jujur dan dipublikasi kepada masyarakat berdasarkan keputusan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2010).

Dalam akuntansi publik, transparansi menjadi hal penting dalam mengelola sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan. Ciri-ciri pemerintah yang transparan manajemen yakni adanya aksesibilitas laporan keuangan, terbukanya tanggung jawab dan adanya keterbukaan penyampaian laporan keuangan kepada publik. Sebagai proses komunikasi dan berbagi informasi, media massa menjadi peran yang sangat penting dalam transparansi. Dalam menyikapi hal ini, Pemerintah harus mampu dalam memilah berbagai informasi yang harus disebarluaskan dan memilih pihak yang berhak menerima informasi tersebut. Pemerintah memiliki dasar asas dalam transaksi yaitu adanya penerapan prinsip yang dapat digunakan oleh pemerintah secara jujur, bijak dan tidak diskriminatif. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang relevan, handal, mudah dipahami, dan dapat diperbandingkan merupakan bentuk pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah. (*The Effect of Good Governance on Regional Financial*, 2022)

Dalam menyelenggarakan akuntabilitas pemerintah daerah membuat laporan kinerja dari suatu sistem manajemen kinerja berupa sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah langkah terstruktur dan sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. *Output* yang diperoleh dari SAKIP ini berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) (Ramadhania & Novianty, 2020).

Pada kinerja pemerintah sangat penting melakukan pengukuran dan peninjauan sehingga terciptanya transparansi atas tanggungjawab yang dilakukan. Pengukuran kinerja merupakan bagian proses sistematis untuk mengevaluasi setiap program kegiatan telah dilaksanakan dari yang direncanakan sesuai dengan rencana, dan melihat apakah telah mencapai keberhasilan dari apa yang telah ditargetkan saat melakukan perencanaan. Hal terpenting dalam melakukan pengukuran ialah menetapkan indikator kerja sebagai tolak ukur dari sebuah penelitian yang memberikan informasi sehingga pihak unit kerja sektor publik dalam meninjau kinerja untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang transparansi kepada masyarakat. Sebagai tolak ukur dalam indikator kerja, menggunakan *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Melalui indikator tersebut dalam penerapan transparansi, dapat meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan relevan serta akurat dalam mempublikasikan informasi. Sehingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengetahui, memantau bahkan mengevaluasi kinerja pemerintah dan terciptanya transparansi antara pemerintah dengan masyarakat. (Novatiani et al., 2019).

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pada instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dan transparansi menentukan kegiatan dan hasil akhir dari pengolaan anggaran agar dapat dipublikasi kepada masyarakat sebagai bukti hasil pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas harus diperiksa pihak yang berkepentingan maupun lembaga independen. Sedangkan prinsip transparansi yaitu harus terbuka baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam menjalankan program pemerintah. Pemerintah yang baik (*good government*) akan mencerminkan pengelolaan anggaran yang baik dengan adanya akuntabilitas data transparansi.

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara yang sebelum tahun 2012 bernama Balai Bahasa Medan, didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 226/0/1999 tanggal 23 September 1999 dan sesuai dengan DIPA Nomor: 143/XXIII/3--/1997 tanggal 31 Maret 1997 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta. Balai Bahasa Sumatera Utara dibangun di atas sebidang tanah yang luasnya 3000 meter persegi terletak di Jalan Kolam Nomor 7, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Tanah yang diganti rugi kepada PTP IX berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 26152.a/434/1996 tanggal 18 Januari 1996. Sertifikat Tanah Balai Bahasa Sumatera Utara dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Hak Pakai No.29 tanggal 23 November 2015 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Retno L.P. Marsud, 2021).

Pagu anggaran BBPSU tahun 2022 sebesar Rp8.494.196.000,-. Dari pagu tersebut, anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp.8.401.824.416,- dengan persentase daya serap 98,91%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 7 sasaran dengan 9 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada tiap-tiap sasaran/indikator kegiatan. (Retno L.P. Marsud, 2021)

Tabel 1. Serapan anggaran berdasarkan SK dan IKK

No	SK	IKK	Anggaran	Realisasi	Daya Serap
1	Tersedia produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	143.173.000	142.713.000	99,68
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi	630.997.000	620.598.100	98,35

	kebahasaan dan kesastraan	kebahasaan dan kesastraan			
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	249.001.000	243.473.932	97,78
		Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	270.541.000	264.471.887	97,76
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar BIPA	124.347.000	118.877.565	95,60
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah produk penerjemahan	300.000.000	292.799.600	97,60
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	2.397.273.000	2.375.198.175	99,08
7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Utara	Predikat SAKIP Balai Bahasa Sumatera Utara	3.288.966.000	3.262.305.396	99,19
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAK/L Balai Bahasa Sumatera Utara	1.089.898.000	1.081.386.761	99,22

Sumber: LAKIN BALAI BAHASA SUMUT (2022)

Penelitian ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan LAKIN BALAI BAHASA SUMUT Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi dalam bidang akuntansi, dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, semakin dipercaya oleh masyarakat karena terciptanya transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan LAKIN.

KAJIAN PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah (Dalam & Republik, 2014). Menurut Mardiasmo (2009) transparansi adalah: "Keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi" (Novatiani et al., 2019). Sedangkan menurut Hari Sarbano (2007;38)

transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan memudahkan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi merupakan suatu pedoman dalam melaksanakan prinsip keterbukaan proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan yang dimaksud berarti bahwa informasi yang disampaikan harus detail dan tepat waktu kepada semua pihak yang berwenang. *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) menjelaskan terkait beberapa prinsip transparansi seperti yang telah disampaikan dalam penelitian Julkarnain (Islam & Utara, 2018), antara lain : adanya kemudahan memahami dan mengakses informasi oleh publik (sumber anggaran dana, kegiatan pelaksana, bentuk bantuan), adanya publikasi media terkait kegiatan - kegiatan dan detail pembiayaan atau keuangan kegiatan, adanya laporan keuangan secara berkala dalam memanfaatkan sumber dana pada kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung, adanya laporan tahunan yang dibuat organisasi, website atau media publikasi dalam organisasi, dan aturan dalam menyebarluaskan informasi (Oktavia Widhawati et al., 2021).

Indikator-indikator dari transparansi yaitu: Penyediaan informasi yang jelas, mudahnya akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah (Ekonomi & Cendana, 2021). Sedangkan menurut Mardiasmo (2003), kriteria dikatakan transparansi anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif sebagai berikut (Medan, n.d.): terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara atau usulan rakyat, terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Melalui dua rujukan referensi indikator tersebut, penelitian ini mengambil indikator gabungan yang mencakup dari keduanya yaitu: menyajikan informasi anggaran yang transparan, adanya kemudahan dalam mengakses informasi, laporan pertanggungjawaban yang efisien, menerima masukan dari masyarakat terhadap perbaikan instansi, menggunakan sistem yang efektif dalam mempublikasikan informasi.

Mardiasmo (2018:27) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Hamid (2007: 136) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan (Medan, n.d.)

Akuntabilitas dimaknai juga sebagai bentuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Pengelolaan, n.d.). Hulme dan Turner mengemukakan bahwa akuntabilitas memiliki beberapa indikator sebagai berikut: "Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen dalam pengukurannya, yaitu dengan indikator yang terdiri dari (1) legitimasi para pembuat kebijakan, (2) keberadaan moral yang memadai, (3) kepekaan, (4) keterbukaan, (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal, (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas."

Kinerja atau prestasi kerja berasal dari konsep *performance*. Kinerja merupakan kegiatan pekerjaan dan hasil yang dicapai melalui pekerjaan. Kinerja adalah tentang apa yang dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan. Kinerja adalah hasil kerja yang berkaitan erat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. (Armstrong dan Baron, 1998). Moeheriono (2009), sebaliknya, mendefinisikan kinerja atau *performance* sebagai gambaran keseluruhan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan suatu program kegiatan atau kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi. (Choiri, 2023)

Sedangkan menurut Indra Bastian (2010: 274), menyatakan bawah kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi instansi pemerintah yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategis planning*) suatu organisasi (Medan, n.d.).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diuraikan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 = Terdapat pengaruh transparansi (X1) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y)

H2= Terdapat pengaruh akuntabilitas (X2) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y)

H3= Terdapat pengaruh transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) secara simultan terhadap kinerja instansi pemerintah (Y)

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menjelaskan pengaruh transparansi dan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah Sumatera Utara pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Menurut pendapat Sugiyono bahwa penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Machali, 2021). Unit analisis dalam penelitian ini adalah Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, sehingga populasi ini adalah seluruh pegawai instansi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Pengambilan sampel ini juga mengambil keseluruhan responden dari pegawai instansi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara.

Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*. Menurut Sugiyono (2017:82) "*probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel". *Probability sampling* terdiri dari *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *area (cluster) sampling*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *simple random sampling*, kemudian menurut Sugiyono (2017:82) *Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan cara : penyebaran kuesioner kepada pegawai instansi dan data sekunder berupa dokumentasi diambil dengan cara studi kepustakaan (*library research*) melalui LAKIN.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner disebarikan kepada pegawai instansi Balai Bahasa Sumatera Utara. Penyebaran kuesioner penelitian yang menggunakan skala Likert. Sedangkan dokumentasi laporan kinerja (LAKIN) diambil dari website resmi Balai Bahasa Sumatera Utara.

Dalam mengukur instrumen penelitian yang digunakan adalah uji validitas dan uji reabilitas. Uji validitas digunakan dalam menguji ketepatan atau kecermatan. Sedangkan uji reabilitas dilakukan terhadap pertanyaan yang dinyakan valid. Kuesioner dikatakan valid jika dilakukannya konsisten dari waktu ke waktu/stabil. Pengujian asumsi klasik dilakukan

meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan parameter: Uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R²). Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (variabel terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. (Asmah, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Rincian profil responden berdasarkan hasil penyebaran angket kuesioner terdapat pada tabel 1.

Tabel 2. Profil Demografi Responden

Profil Responden	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
• Laki-laki	16	50%
• Perempuan	16	50%
Umur		
• 25-34	7	21,9%
• 35-44	7	21,9%
• 45-54	17	53,2%
• 55-64	1	3%
Pendidikan Terakhir		
• SMA	-	-
• S1	18	56,3%
• S2	12	37,5%
• S3	-	-
Jabatan		
1) Analisis kata dan istilah	2	6,3%
2) Bendahara Pengeluaran	1	3,1%
3) Honorer	1	3,1%
4) Kasubbag Umum	1	3,1%
5) Kepala	1	3,1%
6) PPSPM	1	3,1%
7) Penerjemah Ahli Muda	1	3,1%
8) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1	3,1%
9) Pengadministrasian Sarpas	1	3,1%
10) Pengadministrasian kepegawaian	1	3,1%
11) Pengadministrasian Keuangan	1	3,1%
12) Pengelola BMN	1	3,1%
13) Pengelola data tata organisasi dan tatalaksana	1	3,1%
14) Pengkaji Bahasa dan Sastra	6	18,8%
15) Penyuluh Bahasa	1	3,1%
16) Penyuluh Kebahasaan	1	3,1%
17) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	3,1%
18) Sekretaris Pimpinan	1	3,1%
19) Supir kepala kantor	1	3,1%
20) Widyabasa	3	9,4%
21) Widyabasa ahli madya	1	3,1%

22) Widyabasa Ahli Muda	3	9,4%
Lama Bekerja		
• <5 tahun	7	21,9%
• 5-10 tahun	-	-
• >10 tahun	25	78,1%

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan data demografi responden tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah yang mengisi kuesioner penelitian ada 32 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 16 perempuan. Rentang umur juga lebih banyak yang berusia diatas 45 tahun. Latar belakang pendidikan responden didominasi oleh lulusan S1. Jabatan responden beragam namun tingkat terbanyak ada 6 responden dengan jabatan yang sama yaitu pengkaji bahasa dan sastra. Responden yang mengisi kuesioner juga sebagian besar telah bekerja diatas 10 tahun.

Pengujian kualitas data

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk uji validitas kuesioner dilakukan dengan membandingkan r hitung atau nilai *Pearson Correlation* dengan membandingkan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel (dengan sig. 0,05), maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jadi apabila nilai r hitung atau nilai *Pearson Correlation* lebih kecil dari nilai r tabel maka butir pertanyaan dalam kuesioner untuk variabel tersebut tidak valid atau jika r hitung < r tabel (dengan sig. 0,05), maka kuesioner tersebut tidak valid. Kuesioner penelitian ini diuji kepada 32 responden. Nilai r tabel untuk diuji dua sisi pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Karena jumlah data (n) 32 atau df (*degree of freedom*) = 30. Df (*degree of freedom*) diperoleh dari jumlah responden dikurangi dengan 2 (df = n-2) atau df = 32 -2 = 30. Maka diperoleh r tabel sebesar 0,349. Selanjutnya pengujian reliabilitas. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu. Pengujian reliabilitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. (Hirani & Silalahi, 2020) Hasil pengujian validitas dan reabilitas terhadap data adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel	N	KMO MSA	Sign	Nilai Cronbach's Alpha
Transparansi (X1)	32	0,786	0,000	0,760
Akuntabilitas (X2)	32	0,799	0,000	0,761
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	32	0,652	0,000	0,664

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan tabel 3 semua item pernyataan untuk variabel tingkat transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan kinerja instansi pemerintah (Y) lebih besar dari 0,50 dengan signifikan masing-masing variabel 0,000. Maka, dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian sudah valid dan penelitian dapat dilanjutkan untuk pada pengujian selanjutnya. Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan pada tabel diatas diperoleh hasil nilai *Cronbach's alpha* pada variabel penelitian lebih besar dari nilai 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen atau variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan atas jawaban responden terhadap pernyataan yang diajukan dari masing-masing indikator pengukuran variabel. Tabel berikut ini menunjukkan hasil statistik deskriptif yang diperoleh:

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Transparansi (X1)	32	16	40	25,88	4,164
Akuntabilitas (X2)	32	9	40	26,75	4,925
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	32	20	44	30,91	4,686

Sumber: Data olahan (2023)

Pada tabel 4. terlihat statistik deskriptif yang mencerminkan sebaran data pada masing-masing variabel penelitian yaitu transparansi, akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Dari tabel tersebut dapat terlihat nilai mean lebih besar dari standar deviasi sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas dan semuanya menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. Berdasarkan hasil pengujian normalitas, nilai asymp sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,200	Normal

Sumber: Data olahan (2023)

Pada hasil pengujian multikolinearitas, nilai *tolerance* seluruh variabel penelitian > 0,10 dan nilai VIF < 10, hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model persamaan regresi. Dimana nilai tolerance value dari variabel X1 dan X2 menunjukkan angka 0,570 dan nilai VIF dari variabel X1 dan X2 adalah 1,755. Nilai signifikansi yang di uji dengan probabilitas 0,05, menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 mencapai angka 0,048 dan 0,238 yang dimana X1 tidak memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari angka signifikansinya dan nilai signifikansi X2 lebih besar dari nilai signifikansinya. Hasil pengujian multikolinearitas dan heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas

Variabel	Tolerance	VIF	Sig.
Transparansi (X1)	0,570	1,755	0,048
Akuntabilitas (X2)	0,570	1,755	0,238

Sumber: Data olahan (2023)

Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel transparansi dan akuntabilitas (variabel independen) berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah (variabel dependen). Kemudian peneliti melanjutkan tahap pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda yang terlihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Regresi linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	12,946	4,585		2,823	,008
	Transparansi (X1)	,460	,223	,408	2,061	,048
	Akuntabilitas (X2)	,227	,189	,238	1,204	,238

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sumber: Data olahan (2023)

Transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan signifikan $0,048 < 0,05$. Hal ini menyimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Semakin jelas transparansi yang ditargetkan dan ditetapkan, maka akan semakin baik tingkat kinerja instansi pemerintah. Temuan ini konsisten dengan adanya literatur sebelumnya (Noviatiani et al. 2019; Auditya, dkk, 2013). Dengan memperluas saluran transparansi yang ada selama ini di pemerintahan maka pengawasan akan lebih baik dari pemberi amanah dan masyarakat sehingga tingkat pencapaian kinerja pemerintah dapat lebih baik (Novatiani et al., 2019). Hal ini sangat berkaitan antara tingkat transparansi yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kinerja instansi pemerintah menjadi lebih baik.

Akuntabilitas dinyatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dengan sigifikan $0,238 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah belum menerapkan akuntabilitas secara maksimal. Sistem akuntabilitas penting dilakukan bagi setiap instansi pemerintah, hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya (Jitmau et al., 2017) yang menyatakan bahwa penyebab akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena pemerintah gagal menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Pengujian Hipotesis H1 dan H2 dengan Uji t

Uji Hipotesis H1:

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap y adalah sebesar $0,048 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,061 > t \text{ table } 2,045$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y.

Uji Hipotesis H2:

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,238 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,204 < t \text{ table } 2,045$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

Uji Hipotesis H3 dengan uji F:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	239,186	2	119,593	7,855	,002 ^b
	Residual	441,533	29	15,225		
	Total	680,719	31			

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan output diatas diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai F hitung $7,855 > F \text{ tabel } 3,32$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. Sehingga dinyatakan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas secara simultan terhadap variabel kinerja instansi pemerintah.

Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,593 ^a	,351	,307	3,90196

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan output diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,351, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 35,1%.

SIMPULAN

Secara simultan menunjukkan bahwa variabel transparansi (X1), variabel akuntabilitas (X2), berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kinerja instansi pemerintah (Y) pada Balai Bahasa Sumatera Utara. nilai koefisien korelasi secara simultan sebesar 0,351 atau sebesar 35,1% menunjukkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 35,1% terhadap variabel kinerja instansi pemerintah. Pada variabel transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Balai Bahasa Sumatera Utara. Karena semakin transparansi dilakukan, maka akan semakin meningkat kinerja instansi pemerintah. Sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan pemerintah gagal menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Menurut hasil penelitian, evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum rutin dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah dan belum semua instansi pemerintah menyampaikan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian target instansi dalam LAKIN.

Referensi :

- Accounting, M. R., Journal, B., Nadila, Z., Ahyaruddin, M., Akuntabilitas, L., & Instansi, K. (2021). *INSTANSI PERSPEKTIF TEORI INSTITUSIONAL : PEMERINTAH*. 2(April).
- Asmah, A. Y. (2020). Pengaruh Kepercayaan Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pondok Pesantren Kholaf. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2(1505046004), 12-26. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i2.1540>
- Choiri, C. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1), 22-32. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3401>
- Dalam, M., & Republik, N. (2014). *No Title*. 1-16.
- Ekonomi, F., & Cendana, U. N. (2021). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK)*. 9(1), 62-72.
- Hirani, E., & Silalahi, A. D. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan*, 1(1), 23-28.
- Indonesia, R. (2010). *Presiden republik indonesia*.
- Islam, U., & Utara, S. (2018). *Akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kualitas sistem manajemen keuangan masjid di kota medan*. 5(2), 1-9.
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 276-285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Laoli, V., & Si, M. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias*. 3.
- Machali, I. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMACA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Issue April).
- Medan, F. (n.d.). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola anggaran pada*

- dinas kehutanan provinsi sumatera utara*. 1-11.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51-62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Oktavia Widhawati, E., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 363-375.
- Pengelolaan, T. (n.d.). *No Title*.
- Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM, September*, 1-2.
- Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 807-813.
- Retno L.P. Marsud. (2021). Laporan Kinerja. *Laporan Kinerja Ditjen MIGAS*, 53(9), 1689-1699.
- S, D. A., Mayang, A., Fitranita, V., & Oktari, I. (2020). *Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. 5(1), 85-94.
- the Effect of Good Governance on Regional Financial*. (2022). 2022(3), 1-9.